

KEGIATAN UNGGULAN

01.

# Instrumen dan Analisis Pengelolaan Keuangan Publik

**Sukses KOMPAK 2022:** Pemerintah daerah telah meningkatkan kualitas pembelanjaan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar

## KOMPONEN KEGIATAN UNGGULAN

- 1.1 Memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menggunakan instrumen dan analisis pengelolaan keuangan publik untuk perencanaan dan penganggaran (SEPAKAT, *Constraint Analysis*, SPM)
- 1.2 Memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengakses dan menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat (DAK Fisik, DAK Non-fisik dan DID) untuk mendukung penyediaan layanan dasar dan pelembagaan model-model KOMPAK
- 1.3 Memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten di Papua, Papua Barat dan Aceh untuk melaksanakan kebijakan otonomi khusus
- 1.4 Mengembangkan dan mendukung pelembagaan model-model insentif pembiayaan berbasis kinerja bagi desa untuk meningkatkan penyediaan layanan dasar

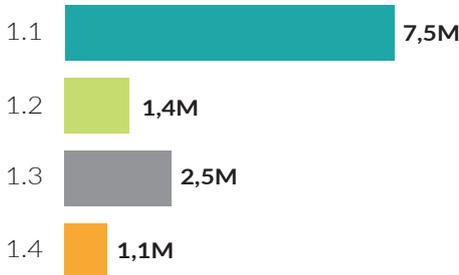


Total anggaran kegiatan untuk Instrumen dan Analisis Pengelolaan Keuangan Publik\*

**Rp12,5M**

## Berapa Besar Alokasi untuk Setiap Komponen?

Anggaran berdasarkan komponen kegiatan unggulan (IDR)\*



## Kementerian:



## Bekerja Sama dengan:



## Mitra Pelaksana:



## Dimanakah KOMPAK Bekerja?

Anggaran berdasarkan provinsi dan komponen kegiatan unggulan (IDR)\*



\*Angka yang tercantum belum mendapat persetujuan akhir dan masih dapat berubah.

## AREA FOKUS

### Komponen 1: Memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menggunakan instrumen dan analisis pengelolaan keuangan publik untuk perencanaan dan penganggaran (SEPAKAT, Constraint Analysis, dan SPM)



- Adopsi SPM Kabupaten:** Mendukung pemerintah kabupaten untuk mengintegrasikan standar pelayanan minimum (SPM) sebagai dasar untuk perencanaan dan penganggaran.
- Analisis kemiskinan dan anggaran kabupaten:** Memberikan bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten tentang penggunaan SEPAKAT, instrumen analisis kemiskinan dan mengimplementasikan temuan-temuan dari Analisis Kendala Anggaran.
- Kerangka kerja pemantauan nasional dan analisis biaya:** Di tingkat nasional, mendukung Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas untuk menyelesaikan kerangka kerja pemantauan SPM dan memulai pelaporan kabupaten secara nasional. Ini dilengkapi dengan analisis biaya untuk mengimplementasikan SPM di semua kabupaten di Indonesia.

### Komponen 2: Memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengakses dan menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat (DAK Fisik, DAK Non-fisik dan DID) untuk mendukung penyediaan layanan dasar dan pelembagaan model-model KOMPAK



- DAK Fisik:** Memberikan bantuan teknis kepada Bappenas untuk meningkatkan formula DAK Fisik dan kepada pemerintah kabupaten dalam menyeleksi dan menyusun proposal infrastruktur dengan menggunakan aplikasi *on-line* KRISNA, dengan fokus pada proyek yang menangani bidang prioritas SPM.
- DAK Non-fisik:** Mendukung Kementerian Keuangan untuk meningkatkan pembiayaan DAK Non-fisik dan pelaporannya dari pemerintah provinsi dan kabupaten, serta memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dalam mengevaluasi, merencanakan, mengkoordinasikan, serta menjalankan anggaran operasional mereka.
- Dana Insentif Daerah (DID):** Mendukung Kementerian Keuangan dalam meningkatkan indikator dan formula DID. Di tingkat provinsi dan kabupaten, memberikan bantuan teknis kepada pemerintah untuk memperkuat indikator dan meningkatkan kemampuan mereka pada saat dilakukan monitoring dan pelaporan, serta pada saat membuat perencanaan, menggunakan dan melaporkan penggunaan DID.

### Komponen 3: Memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten di Papua, Papua Barat dan Aceh untuk melaksanakan kebijakan otonomi khusus



- Evaluasi otonomi khusus:** Mendukung pemerintah provinsi dan kabupaten di Aceh, Papua dan Papua Barat untuk mengimplementasikan berbagai rekomendasi dari evaluasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus), seperti memberi dukungan dalam mendesain dan mengimplementasikan Program PROSPPEK, termasuk melakukan studi awalan.
- BANGGA Papua:** Mendukung Pemerintah Papua dalam melaksanakan Program BANGGA Papua, terutama dalam pembayaran, pendaftaran, komunikasi dan tata kelola.

### Komponen 4: Mengembangkan dan mendukung pelembagaan model-model insentif pembiayaan berbasis kinerja bagi desa untuk meningkatkan penyediaan layanan dasar



- Dana Insentif Desa (DINDA\*):** Mendukung evaluasi pelaksanaan DINDA terhadap kinerja desa dan mendokumentasikan pendekatan, pelajaran yang diambil dan mekanisme untuk replikasi. Model Dana Insentif Desa (DINDA) memberikan penghargaan kepada desa-desa dengan alokasi dana tambahan untuk peningkatan kinerja pada indikator dasar kesehatan, pendidikan, dll.

\* DINDA mengacu pada akronim model Dana Insentif Desa yang dikembangkan di Kabupaten Bima, NTB. Inisiatif di kabupaten lain menggunakan nama yang berbeda.

KEGIATAN UNGGULAN

02.

# Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH) yang Inklusif

**Sukses KOMPAK 2022:** Pemerintah daerah dan unit layanan telah meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan PASH

## KOMPONEN KEGIATAN UNGGULAN

- 2.1 Meningkatkan cakupan, kapasitas, pembiayaan lokal dan interkoneksi dari pendekatan PASH berbasis desa dan kecamatan
- 2.2 Meningkatkan kolaborasi lintas sektor, terutama dengan unit-unit layanan (contoh: klinik, rumah sakit, sekolah) untuk mempercepat cakupan PASH
- 2.3 Menyusun dan memasukkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan layanan PASH untuk kelompok rentan (termasuk kelompok minoritas, penyandang disabilitas dan orang terdampak keadaan darurat)

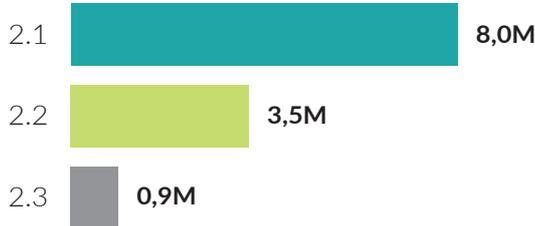


Total anggaran kegiatan untuk Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati yang inklusif dan akuntabel\*

**Rp12,4M**

## Berapa Besar Alokasi untuk Setiap Komponen?

Anggaran berdasarkan komponen kegiatan unggulan (IDR)\*



## Kementerian:



## Bekerja Sama dengan:



Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

## Mitra Pelaksana:



PUSAT KAJIAN PERLINDUNGAN ANAK  
CENTER ON CHILD PROTECTION



## Dimanakah KOMPAK Bekerja?

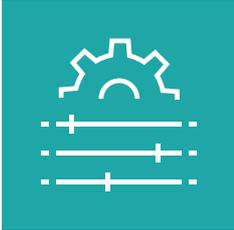
Anggaran berdasarkan provinsi dan komponen kegiatan unggulan (IDR)\*



\*Angka yang tercantum belum mendapat persetujuan akhir dan masih dapat berubah.

## AREA FOKUS

### Komponen 1: Meningkatkan cakupan, kapasitas, pembiayaan lokal dan interkonektivitas dari pendekatan PASH berbasis desa dan kecamatan



- a. **Model Fasilitator PASH Desa:** Mendukung desa untuk melibatkan dan membiayai fasilitator PASH Desa. Jika tidak memungkinkan, desa akan didorong untuk menunjuk petugas desa tersendiri untuk layanan PASH.
- b. **Pedoman nasional dan paket pelatihan untuk layanan PASH Desa:** Di tingkat nasional, mendukung Bappenas untuk menyelesaikan dan melaksanakan paket pedoman nasional, manual dan pelatihan untuk pelatih (ToT) tentang pelaksanaan layanan PASH di bawah UU Desa.
- c. **Evaluasi dan penelitian PASH:** Mengidentifikasi elemen-elemen paling sukses dari pendekatan untuk dapat diadopsi pemerintah.

### Komponen 2: Meningkatkan kolaborasi lintas sektor, terutama dengan unit-unit layanan (contoh: klinik, rumah sakit, sekolah) untuk mempercepat cakupan PASH



**Koordinasi dalam pencatatan sipil antara unit layanan dan pemerintah daerah:** Mendukung pemerintah kabupaten dan kecamatan untuk membentuk layanan rujukan dan target penjangkauan di unit layanan, terutama bagi populasi dengan cakupan yang rendah selama ini seperti orang dengan disabilitas atau masyarakat miskin.

### Komponen 3: Menyusun dan memasukkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan layanan PASH untuk kelompok rentan (termasuk kelompok minoritas, penyandang disabilitas dan orang terdampak keadaan darurat)



**Strategi Nasional untuk Percepatan Administrasi Kependudukan:** Memberikan bantuan teknis kepada Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kantor Staf Presiden untuk membantu kementerian atau lembaga menerapkan Strategi Nasional untuk Percepatan Administrasi Kependudukan (Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2019).

KEGIATAN UNGGULAN

03.

# Penguatan Kecamatan dan Desa

**Sukses KOMPAK 2022:**

- Pemerintah desa memiliki kapasitas dan mekanisme (termasuk data) untuk meningkatkan layanan dasar di tingkat desa dan antardesa
- Pemerintah daerah menyediakan dukungan efektif kepada desa dan unit layanan (klinik desa dan sekolah) untuk meningkatkan layanan dasar

## KOMPONEN KEGIATAN UNGGULAN

3.1	Meningkatkan cakupan dan mendukung pelembagaan model tata kelola kecamatan dan desa (PTPD dan PbMAD)
3.2	Memperkuat peran koordinasi dan pendampingan oleh kecamatan untuk mendukung penyediaan layanan dasar di desa
3.3	Memperkuat kapasitas desa dalam perencanaan dan penganggaran yang inklusif untuk penyediaan layanan dasar
3.4	Mendukung perencanaan bersama dan kolaborasi antara kabupaten, kecamatan, desa dan unit layanan (contoh: klinik, sekolah) dalam penyediaan layanan dasar (LANDASAN)

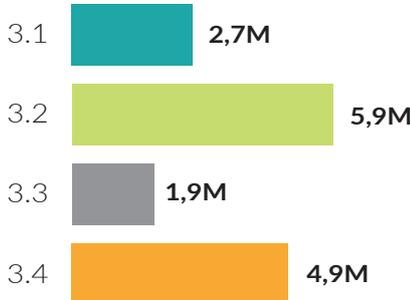


Total anggaran kegiatan untuk Penguatan Kecamatan dan Desa\*

**Rp15,4M**

## Berapa Besar Alokasi untuk Setiap Komponen?

Anggaran berdasarkan komponen kegiatan unggulan (IDR)\*



**Kementerian:**



**Bekerja Sama dengan:**

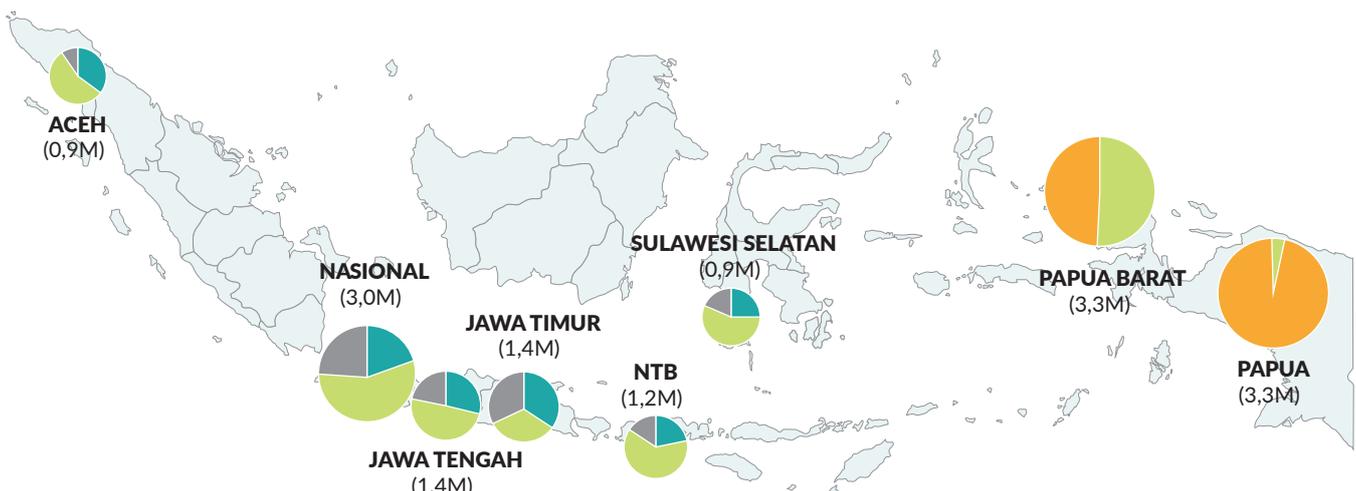


**Mitra Pelaksana:**



## Dimanakah KOMPAK Bekerja?

Anggaran berdasarkan provinsi dan komponen kegiatan unggulan (IDR)\*



\*Angka yang tercantum belum mendapat persetujuan akhir dan masih dapat berubah.

## AREA FOKUS

### Komponen 1: Meningkatkan cakupan dan mendukung pelebagaan model tata kelola kecamatan dan desa (PTPD dan PbMAD\*)



- a. **Peningkatan kapasitas bagi unit PTPD dan pelaksanaan modul pembelajaran mandiri (PbMAD):** Berfokus pada mendirikan, memperkuat, memperluas, dan mereplikasi PTPD, PbMAD dan Klinik Desa, serta memperkuat efektivitas model tersebut.
- b. **Pedoman kabupaten dan pembiayaan:** Mendukung pemerintah kabupaten untuk melebarkan regulasi dan mengatur pembiayaan untuk PTPD dan PbMAD di seluruh kecamatan target KOMPAK. KOMPAK juga akan mendukung untuk replikasi model-model PTPD dan PbMAD kepada kecamatan-kecamatan lainnya.
- c. **Pemantauan kabupaten terhadap efektivitas PTPD dan PbMAD:** Mendukung pemerintah kabupaten untuk mengembangkan evaluasi kinerja kecamatan yang menyediakan model PTPD dan PbMAD.
- d. **Peraturan dan pedoman nasional:**
  - Mendukung Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan Strategi Nasional Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa.
  - Mendukung Bappenas untuk mengembangkan kebijakan tata kelola desa dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang.
- e. **Program Tata Kelola Desa dari Pemerintah Indonesia-Bank Dunia:** Menyediakan bantuan teknis pada komponen-komponen PTPD dan PbMAD dari program tersebut, dengan mengambil pelajaran dari uji coba pendekatan ini.
- f. **Pemantauan kinerja:** Memantau kemajuan yang mencakup jangkauan regulasi, pendanaan dan penempatan staf untuk model-model, penilaian kemanfaatan dan frekuensi dukungan yang diberikan serta contoh-contoh dukungan kebijakan yang diberikan dan diadopsi oleh lembaga pemerintah.

### Komponen 2: Memperkuat peran koordinasi dan pendampingan oleh kecamatan untuk mendukung penyediaan layanan dasar di desa



- a. **Pelimpahan wewenang dan pendanaan:** Mendukung pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam pelaksanaan peraturan yang melimpahkan wewenang dari bupati ke camat, terutama dalam mengkoordinasikan tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kecamatan, serta memastikan pemerintah kecamatan menerima dana tambahan untuk menjalankan peran mereka yang diperluas.
- b. **Pelatihan camat:** Bekerja dengan pemerintah kabupaten untuk memperluas pelatihan bagi camat dan mengembangkan paket pedoman dan pelatihan nasional bagi Kementerian Dalam Negeri.
- c. **Rapat koordinasi kecamatan:** Mengembangkan pedoman bagi pemerintah kecamatan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, untuk membantu pemerintah kecamatan melakukan rapat koordinasi dan mengembangkan layanan terintegrasi dengan pemerintah desa dan unit layanan.
- d. **Pemantauan kabupaten atas kinerja kecamatan:** Mendukung pengembangan peraturan nasional tentang evaluasi kinerja kecamatan dengan Kementerian Dalam Negeri dan menggunakan pelajaran yang didapat dari uji coba pendekatan tersebut di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Aceh.

### Komponen 3: Memperkuat kapasitas desa dalam perencanaan dan penganggaran yang inklusif untuk penyediaan layanan dasar



- a. **Forum perencanaan pembangunan inklusif (Musrenbang):** Memberikan bantuan teknis kepada pemerintah desa dalam melaksanakan 'Musrenbang Inklusif'.
- b. **Pedoman nasional tentang perencanaan dan penganggaran desa inklusif:** Mendukung Kementerian Dalam Negeri untuk mengembangkan pedoman nasional bagi pemerintah desa tentang cara melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran yang inklusif dan berbasis data.
- c. **Pengembangan kapasitas pemerintah desa:** Mendukung pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam:
  - Memberikan peningkatan kapasitas dan bantuan teknis untuk Badan Permusyawaratan Desa dan aparaturnya mengenai perencanaan dan penganggaran dari fasilitator PTPD dan melalui modul PbMAD, dan
  - Menilai apakah hal itu telah mengarah pada peningkatan alokasi sumber daya untuk layanan dasar, inklusivitas proses perencanaan serta kapasitas untuk mengembangkan dan mengelola rencana dan anggaran desa.

### Komponen 4: Mendukung perencanaan bersama dan kolaborasi antara kabupaten, kecamatan, desa dan unit layanan (contoh: klinik, sekolah) dalam penyediaan layanan dasar (LANDASAN)



Mendukung perencanaan bersama dan kolaborasi antara kabupaten, kecamatan, desa dan unit layanan dalam menyediakan layanan dasar, termasuk pengembangan pedoman perencanaan bersama untuk kabupaten, desa dan unit layanan untuk menangani kesehatan ibu dan anak, gizi buruk, malaria dan HIV/AIDS.

\*PTPD: Pembina Teknis Pemerintahan Desa  
PbMAD: Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa

KEGIATAN UNGGULAN

# 04.

## Sistem Informasi Desa

**Sukses KOMPAK 2022:** Pemerintah desa memiliki keterampilan dan mekanisme (termasuk pengelolaan data) untuk meningkatkan layanan dasar di tingkat desa dan antardesa

### KOMPONEN KEGIATAN UNGGULAN

- 4.1 Meningkatkan cakupan dan mendukung pelebagaan sistem informasi desa
- 4.2 Meningkatkan penggunaan sistem informasi desa oleh desa untuk perencanaan, penganggaran, pelaporan dan kegiatan lainnya
- 4.3 Mengintegrasikan sistem informasi desa dengan sistem informasi daerah lainnya (termasuk Sistem Informasi Administrasi Kependudukan/SIAK)
- 4.4 Mengembangkan dan menguji coba sistem informasi di kecamatan dan kabupaten

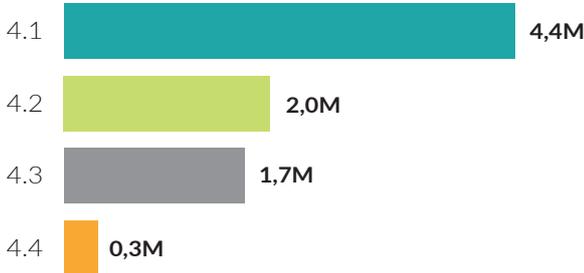


Total anggaran kegiatan untuk Sistem Informasi Desa\*

**Rp8,4M**

### Berapa Besar Alokasi untuk Setiap Komponen?

Anggaran berdasarkan komponen kegiatan unggulan (IDR)\*



### Kementerian:



### Bekerja Sama dengan:



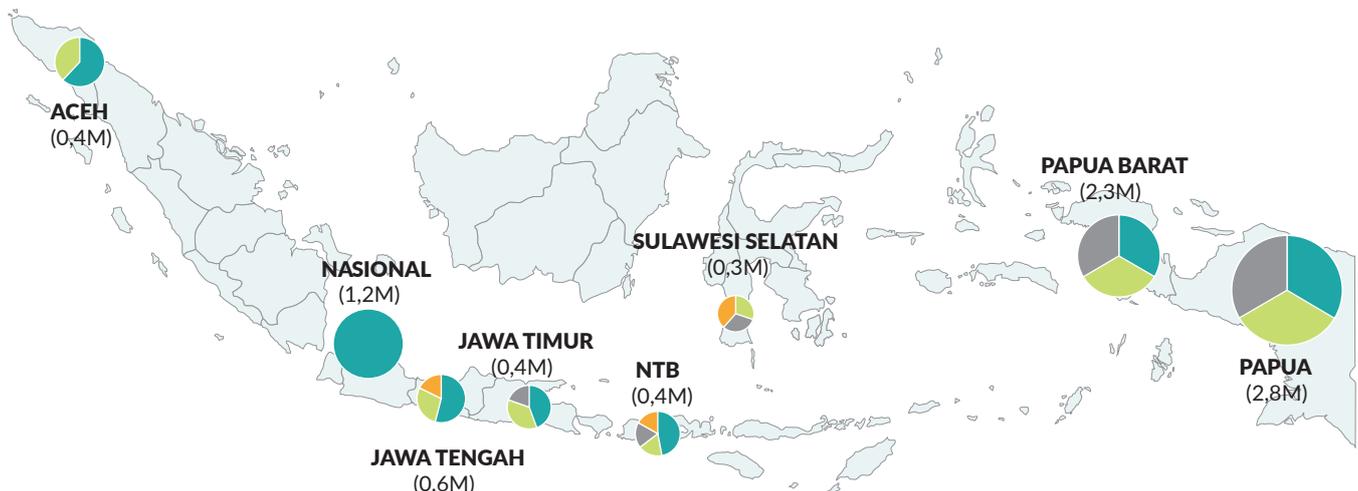
Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

### Mitra Pelaksana:



### Dimanakah KOMPAK Bekerja?

Anggaran berdasarkan provinsi dan komponen kegiatan unggulan (IDR)\*



\*Angka yang tercantum belum mendapat persetujuan akhir dan masih dapat berubah.

**AREA FOKUS****Komponen 1: Meningkatkan cakupan dan mendukung pelebagaan sistem informasi desa**

- a. **Regulasi dan pendanaan kabupaten:** Mendukung pemerintah kabupaten dalam mengembangkan regulasi, pedoman dan mekanisme pendanaan untuk mendukung pelaksanaan, integrasi dan replikasi sistem informasi desa. Fokus akan ada pada pendekatan “satu data”, yang menstandarkan semua sistem informasi desa di tingkat kabupaten untuk memungkinkan agregasi data dan paket dukungan umum.
- b. **Pelaksanaan sistem informasi desa:** Memastikan semua desa memiliki sistem informasi desa yang operasional. Ini akan mencakup pengaturan sistem, melatih operator, menyelesaikan manual pengguna, dan memastikan ada dana desa yang memadai untuk pemeliharaan sistem.

**Komponen 2: Meningkatkan penggunaan sistem informasi desa oleh desa untuk perencanaan, penganggaran, pelaporan dan kegiatan lainnya**

**Bantuan teknis tentang penggunaan sistem informasi desa:** Mendukung pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten untuk menggunakan data dari sistem informasi desa dengan lebih baik untuk memengaruhi perencanaan dan penargetan pemberian layanan dasar (termasuk pencatatan sipil).

**Komponen 3: Mengintegrasikan sistem informasi desa dengan sistem informasi daerah lainnya (termasuk Sistem Informasi Administrasi Kependudukan/SIAK)**

**Integrasi sistem informasi:** Mengadvokasi pendekatan “satu data” di tingkat kabupaten sehingga semua sistem informasi desa merupakan model yang sama. Bantuan juga akan diberikan untuk mengintegrasikan sistem dengan dataset lain, seperti SIAK dan perlindungan sosial (BDT).

**Komponen 4: Mengembangkan dan menguji coba sistem informasi di kecamatan dan kabupaten**

**Sistem informasi kabupaten dan kecamatan:** Meningkatkan efektivitas sistem yang ada dengan mengembangkan *dashboard* dan laporan yang lebih informatif dan dapat ditindaklanjuti, serta mendokumentasikan pelajaran untuk potensi replikasi.

KEGIATAN UNGGULAN

05.

# Akuntabilitas Sosial

**Sukses KOMPAK 2022:**

Masyarakat – terutama perempuan, kelompok miskin dan rentan – mendorong pemerintah dan unit layanan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar

## KOMPONEN KEGIATAN UNGGULAN

- 5.1 Meningkatkan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dan pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme aspirasi, literasi anggaran dan mekanisme akuntabilitas sosial lainnya
- 5.2 Memperkuat kebijakan, pedoman dan model akuntabilitas sosial dan inklusi dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa di tingkat nasional dan daerah

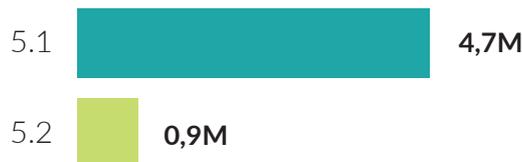


Total anggaran kegiatan untuk Akuntabilitas Sosial\*

**Rp5,6M**

## Berapa Besar Alokasi untuk Setiap Komponen?

Anggaran berdasarkan komponen kegiatan unggulan (IDR)\*



### Kementerian:



### Bekerja Sama dengan:

#### MAMPU

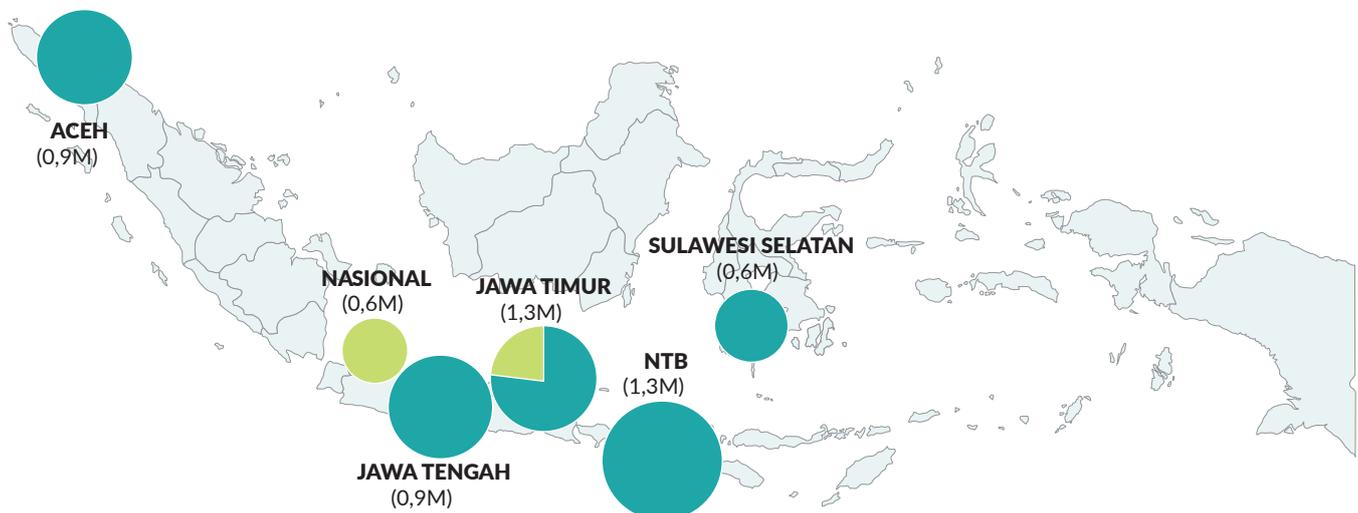
Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

### Mitra Pelaksana:



## Dimanakah KOMPAK Bekerja?

Anggaran berdasarkan provinsi dan komponen kegiatan unggulan (IDR)\*



\*Angka yang tercantum belum mendapat persetujuan akhir dan masih dapat berubah.

## AREA FOKUS

### Komponen 1: Meningkatkan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dan pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme aspirasi, literasi anggaran dan mekanisme akuntabilitas sosial lainnya



- a. **Umpan balik masyarakat dan mekanisme akuntabilitas ke bawah:** Membangun dan mendukung model umpan balik masyarakat seperti Posko Aspirasi dan KLIK PEKKA di desa-desa agar Badan Permusyawaratan Desa dan aparaturnya mengetahui isu-isu dan prioritas utama.
- b. **Pelatihan literasi anggaran:** Sekolah Anggaran (Sekar) Desa akan diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan anggota masyarakat. Ini akan dilengkapi dengan upaya advokasi untuk meningkatkan transparansi anggaran desa melalui publikasi anggaran desa dan laporan pengeluaran *online*, pada papan iklan dan/atau dalam laporan yang tersedia untuk umum.
- c. **Akademi Paradigta:** Akademi Paradigta dan kelompok-kelompok perempuan terkait akan ditransisikan ke pemerintah daerah dan mendapatkan sumber pendanaan alternatif pada awal 2020. Evaluasi akan dilakukan untuk mendokumentasikan pelajaran yang diambil untuk mendorong replikasi. Bantuan teknis akan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk merancang dan mengimplementasikan program Sepeda Keren, yang diadaptasi dari model Paradigta.

### Komponen 2: Memperkuat kebijakan, pedoman dan akuntabilitas sosial dan inklusi dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa di tingkat nasional dan daerah



Memberikan masukan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang kebijakan, pedoman dan model nasional dan daerah untuk akuntabilitas sosial berdasarkan pelajaran yang diambil dalam mengujicobakan mekanisme akuntabilitas sosial. Juga, memberikan bantuan teknis kepada Kementerian Desa – melalui penelitian dan makalah kebijakan – untuk memetakan regulasi Undang-Undang Desa dan mekanisme koordinasi serta mengidentifikasi cara-cara untuk menyederhanakannya.

KEGIATAN UNGGULAN

# 06.

## Keperantaraan Pasar

**Sukses KOMPAK 2022:** Meningkatnya jumlah usaha mikro dan kecil, terutama yang melibatkan masyarakat miskin dan rentan, yang telah meningkatkan produktivitas dan akses pasar mereka

### KOMPONEN KEGIATAN UNGGULAN

- 6.1 Menyelesaikan implementasi dan dokumentasi uji coba model Keperantaraan Pasar
- 6.2 Mengembangkan instrumen dan rekomendasi model bisnis nasional untuk mendukung keberlanjutan Keperantaraan Pasar



Total anggaran kegiatan untuk Keperantaraan Pasar\*

**Rp4,8m**

### Berapa Besar Alokasi untuk Setiap Komponen?

Anggaran berdasarkan komponen kegiatan unggulan (IDR)\*



### Kementerian:



### Bekerja Sama dengan:

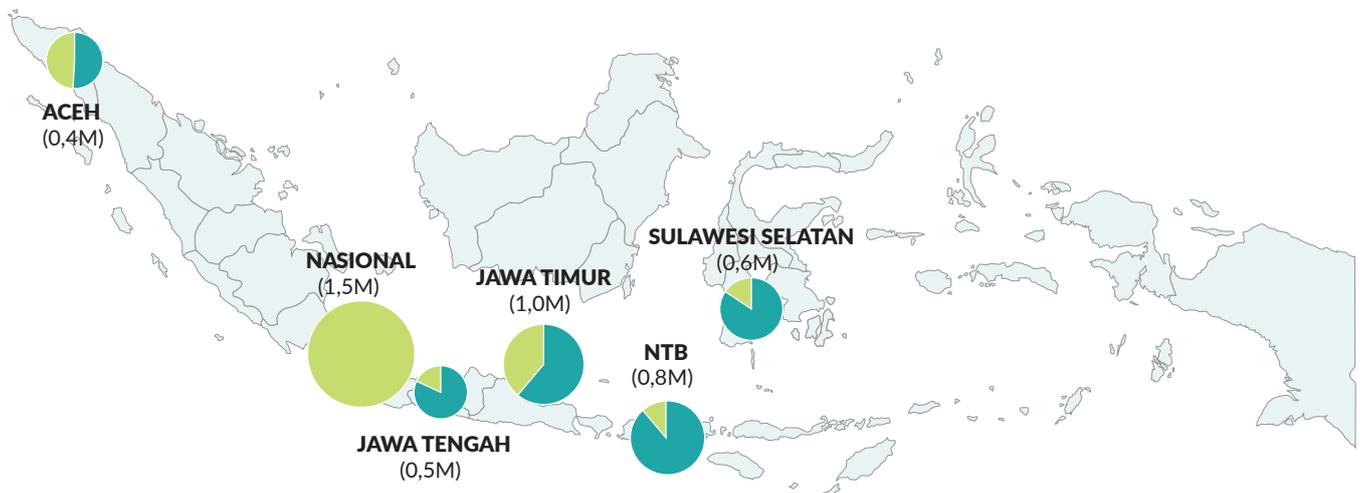
**AIP-PRISMA**  
Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Income through Support for Markets in Agriculture

**MAMPU**  
Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

**MAHKOTA**  
Towards a Strong and Prosperous Indonesian Society

### Di Manakah KOMPAK Bekerja?

Anggaran berdasarkan provinsi dan komponen kegiatan unggulan (IDR)\*



\*Angka yang tercantum belum mendapat persetujuan akhir dan masih dapat berubah.

## AREA FOKUS

## Komponen 1: Menyelesaikan implementasi dan dokumentasi uji coba model Keperantaraan Pasar



- a. **Uji coba dan dokumentasi Keperantaraan Pasar:** Mendukung pemerintah desa untuk mendirikan dan/atau memperkuat usaha mikro dan kecil (UMK) termasuk koperasi, BUMDES dan BUMDESma dan kelompok usaha perempuan. Bantuan teknis akan diberikan untuk mendaftarkan entitas, menetapkan prosedur operasi standar untuk anggota, mengidentifikasi komoditas dan peningkatan rantai nilai (seperti peralatan pemrosesan atau pengemasan), pendanaan yang aman (termasuk melalui investasi dampak sosial) dan untuk menghubungkan UMK dengan pasar *online* dan pembeli.
- b. **Evaluasi Keperantaraan Pasar:** Melakukan evaluasi selama uji coba untuk menilai dampak model terhadap meningkatnya laba UMK, terciptanya lapangan kerja, terpenuhinya kebutuhan pemerintah daerah dan tersedianya lapangan kerja atau peluang layanan bagi penduduk miskin dan rentan.

## Komponen 2: Mengembangkan instrumen dan rekomendasi model bisnis nasional untuk mendukung keberlanjutan Keperantaraan Pasar



- a. **Panduan nasional dan masukan kebijakan tentang model Keperantaraan Pasar:** Mendukung Bappenas memasukkan pelajaran yang diambil dari uji coba ke dalam kebijakan nasional tentang pengembangan ekonomi lokal. Panduan teknis di tingkat kabupaten dan nasional akan dikembangkan untuk mendokumentasikan model dan memfasilitasi replikasi.
- b. **Platform online untuk Keperantaraan Pasar:** Memberikan dukungan teknis dalam desain dan administrasi platform *online* Keperantaraan Pasar yang telah terbangun dan telah dioperasikan oleh *provider*, serta membantu UMK memasarkan dan menjual produk mereka secara *online*.